

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia termasuk organisasi sektor publik yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui pelayanan publik, peraturan, undang-undang, dan tindakan lainnya disebut sebagai nilai publik (Moore, 1995). Secara konseptual, nilai publik merupakan cerminan dari struktur yang bersifat multidimensi yang menggambarkan sebuah proses sehingga menghasilkan kepercayaan dan kesetaraan (Souza dkk., 2022). Nilai publik bagi warga negara dapat diciptakan dengan tata kelola publik yang baik melalui transparansi data dan akses kepada pemerintah.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya adopsi layanan *e-government* di Indonesia. Fokus inisiatif *e-government* sekarang beralih ke penggunaan sumber daya inovatif seperti komunitas online dan jaringan sosial yang merupakan bagian dari web 2.0, yang disisipkan ke area pemerintahan, yang sekarang dikenal sebagai *government 2.0*. Pendekatan inovatif ini memungkinkan pemerintah untuk menilai tugas mereka dalam masyarakat dan hubungan mereka dengan warga negara (Souza dkk., 2022). Juga akan memberikan banyak peluang untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, menciptakan partisipasi dan keterlibatan warga dalam masalah publik.

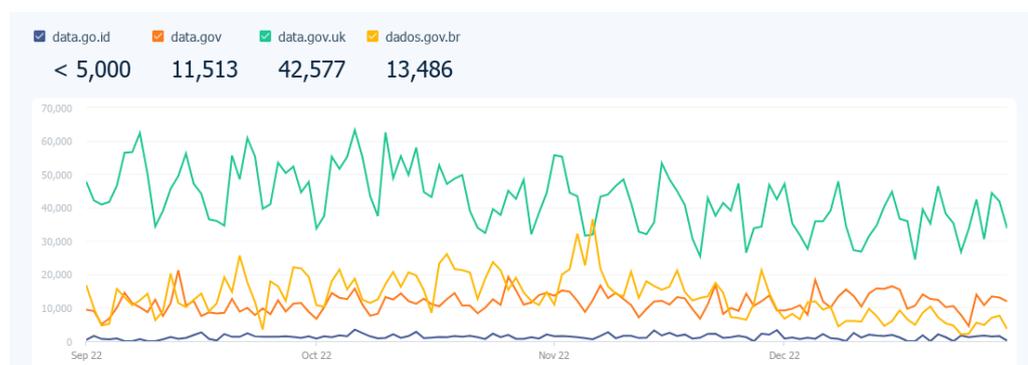
Pemerintahan yang terbuka (*open government*) merupakan sejauh mana pihak eksternal dapat memantau dan mempengaruhi proses pemerintah melalui akses ke pemerintah dalam lingkup pembentukan dan pengambilan keputusan (Souza dkk., 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka dan mempublikasikan apa yang telah, sedang, dan akan dijalankan dalam tugas, fungsi, dan kinerjanya (Mulyaningsih & Safitri, 2022). Data pemerintah terbuka (*Open Government Data*) memicu lebih banyak partisipasi dan keterlibatan warga dengan pemerintah dan merupakan contoh nyata dari nilai utama dalam pemerintahan terbuka (Souza dkk., 2022).

*Open Government Data* (OGD) adalah data gratis, terbuka, dan tersedia oleh organisasi sektor publik yang memberikan informasi yang berguna bagi warga negara (Klein dkk., 2018). Praktik OGD di Indonesia berada pada maturity stage 3, dengan peringkat mulai dari 1 hingga 4. Artinya sudah ada prosedur dan standar dalam pelaksanaan OGD, namun pelaksanaannya masih sebatas formalisasi kegiatan saja (Rahmatika dkk., 2019). Pemerintah Indonesia melaksanakan OGD dengan mengembangkan portal data ([data.go.id](http://data.go.id)) dengan nama Satu Data Indonesia (SDI) sebagai bagian dari inisiatif pemerintahan terbuka. Pemerintah memfasilitasi data terbuka dengan pembentukan infrastruktur TIK dan kerangka kebijakan untuk tata kelola data, manajemen data, dan partisipasi masyarakat. Hasil dari upaya tersebut adalah 136.504 dataset tersedia untuk diakses melalui portal *open data Indonesia* (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Berbagai upaya pemerintah dalam menyediakan OGD ini tidak akan membuahkan hasil tanpa kontribusi dari warga negara untuk menggunakan dan memanfaatkan OGD yang disediakan pemerintah secara efektif untuk

memajukan kebaikan sosial. Jika dibandingkan dari kelompok pengguna, permintaan akan OGD ditemukan paling tinggi di sektor swasta, sedangkan permintaan dari sebagian besar kelompok masyarakat sipil secara signifikan lebih rendah (World Wide Web Foundation, 2013). Gambar 1.1 menunjukkan hasil analisis website oleh *SimilarWeb LTD.* yang diakses pada 1 Januari 2023, dimana diketahui bahwa jumlah pengunjung harian portal *open data Indonesia* (*data.go.id*) selama empat bulan terakhir adalah kurang dari 5.000 pengunjung setiap harinya. Jumlah tersebut tergolong sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh warga negara di Indonesia yang saat ini mencapai 275,77 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka tersebut juga tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan tiga portal *open data* pada beberapa negara lain, yaitu *data.gov* (Amerika Serikat), *data.gov.uk* (Inggris Raya), dan *dados.gov.br* (Brasil). Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui pula bahwa 57.08% pengakses adalah laki-laki dan 42.92% pengakses adalah perempuan (Gambar 1.2). Juga diketahui lebih dari 40% pengakses adalah warga dengan distribusi usia 18-24 tahun (gambar 1.3).

**Gambar 1. 1**  
**Grafik Jumlah Pengakses Portal Open Data**



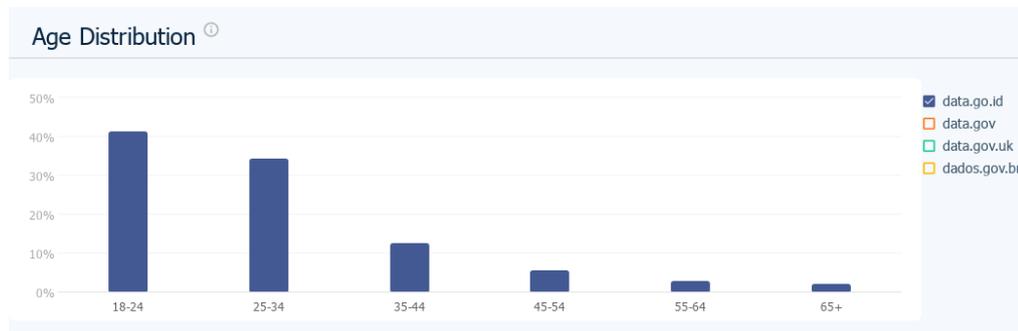
Sumber: analisis website (SimilarWeb LTD., 2019)

**Gambar 1. 2**  
**Distribusi Gender Pengakses Portal Open Data Indonesia**



Sumber: analisis website (SimilarWeb LTD., 2019)

**Gambar 1. 3**  
**Distribusi Usia Pengakses Portal Open Data Indonesia**



Sumber: analisis website (SimilarWeb LTD., 2019)

Inovasi pemerintah dalam memanfaatkan *web 2.0* untuk meningkatkan komunikasi dengan warga adalah dengan penggunaan media sosial, salah satunya Instagram. Hal ini karena Instagram menjadi salah satu media sosial yang populer dan tercatat ada 99,15 juta pengguna Instagram di Indonesia pada awal tahun 2022 (Kemp, 2022). Namun jika diperhatikan, jumlah pengikut akun-akun Instagram pemerintahan sangat sedikit. Sebagai contoh, akun resmi Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas hanya memiliki 25,2 ribu pengikut meski telah dibuat sejak tahun 2017 (Instagram: @data.go.id, 2022). Jumlah tersebut terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pengguna Instagram di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa niat

penggunaan dan minat warga terhadap OGD di Indonesia masih minim dan perlu ditingkatkan kembali.

Minimnya niat penggunaan OGD ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari warga negara akan pentingnya data terbuka, kurangnya motivasi dan tujuan untuk membuka data pemerintah, kurangnya keterbukaan pikiran tentang penerapan data terbuka, dan kurangnya keahlian untuk menganalisis data tersebut (Abdelrahman, 2021). Kurangnya niat penggunaan OGD oleh masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan implementasi OGD di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam mempertimbangkan kebutuhan khusus dari pengguna data dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan penggunaan OGD tersebut.

Mengingat bahwa sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat penggunaan (Effendi, 2022), penelitian ini mengusulkan untuk membahas apa saja faktor yang mungkin dapat mempengaruhi sikap warga negara terhadap pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan *government 2.0*, yang selanjutnya sikap ini dapat mempengaruhi niat mereka untuk menggunakan *Open Government Data* (OGD). Secara khusus, delapan faktor yang akan diuji oleh penulis adalah kemudahan penggunaan, kegunaan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kompetensi internet, kepuasan politik, kepercayaan pada pemerintah, dan intensitas penggunaan internet. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya telah menunjukkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan niat warga negara untuk menggunakan *Open Government Data* (OGD). Faktor kemudahan, motivasi, dan kerangka hukum (Purwanto dkk., 2020); kemudahan penggunaan, kualitas layanan dan konten (Baharon dkk., 2017); kemudahan penggunaan, kegunaan, motivasi intrinsik, kepuasan politik,

kepercayaan pemerintah, dan intensitas penggunaan internet (Souza dkk., 2022). Karena ada rekomendasi untuk memahami masalah ini di negara lain (Wirtz dkk., 2017a, 2017b), penelitian ini tepat untuk dilakukan, khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara pendiri *Open Government Partnership* (OGP). Inisiatif ini diluncurkan pada September 2011 oleh delapan negara (Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat) berkomitmen untuk membuat pemerintah mereka lebih terbuka dan bertanggung jawab kepada warganya (Open Government Partnership, 2018). Peneliti ingin bergabung dalam upaya penelitian menggunakan model yang sama di negara-negara bagian dari inisiatif *Open Government Partnership* (OGP) untuk membandingkan hasilnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kontribusi utama dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan beberapa faktor yang sudah dipertimbangkan dari literatur dalam hal sikap dan niat untuk menggunakan *Open Government Data* di Indonesia, maka judul dari penelitian ini adalah “**Faktor Yang Mempengaruhi Sikap dan Niat Warga Negara Indonesia untuk Menggunakan *Open Government Data* (OGD)**” dengan sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0* sebagai variabel intervening.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0* berpengaruh terhadap niat warga negara untuk menggunakan *Open Government Data* (OGD)?

2. Apakah kemudahan penggunaan yang dirasakan warga berpengaruh terhadap persepsi warga tentang kegunaan *Open Government Data* (OGD)?
3. Apakah kemudahan penggunaan *Open Government Data* (OGD) berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?
4. Apakah kegunaan *Open Government Data* (OGD) berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?
5. Apakah motivasi intrinsik warga untuk menggunakan *Open Government Data* (OGD) berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?
6. Apakah motivasi ekstrinsik warga untuk menggunakan *Open Government Data* (OGD) berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?
7. Apakah kompetensi internet berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?
8. Apakah kepuasan politik berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?
9. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?
10. Apakah intensitas penggunaan internet berpengaruh terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0* sebagai variabel intervening terhadap niat warga negara untuk menggunakan *Open Government Data (OGD)*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan warga terhadap persepsi warga tentang kegunaan *Open Government Data (OGD)*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan *Open Government Data (OGD)* terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kegunaan *Open Government Data (OGD)* terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi intrinsik warga untuk menggunakan *Open Government Data (OGD)* terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi ekstrinsik warga untuk menggunakan *Open Government Data (OGD)* terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi internet terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan politik terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap sikap warga negara terhadap *open government* dan *government 2.0*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membacanya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pihak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi penerapan *open government* dan *government 2.0* juga meningkatkan penggunaan *Open Government Data* (OGD) oleh warga negara.